

## Analisis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Mendukung Tertib Administrasi Aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya

Salomo Sinaga<sup>a\*</sup>, Anike Retawati<sup>a</sup>, MHD Daffa Ashari<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Palangka Raya, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 16-04-2026

Revised : 11-05-2026

Accepted : 17-05-2026

**Keywords:** *Asset Administration, Asset Planning, BPKAD, Regional Government Property, RKBMD*

**Kata Kunci:** *Administrasi Aset, Barang Milik Daerah, BPKAD, Perencanaan Aset, RKBMD*

Corresponding Author:

[salomosalomosinaga@gmail.com](mailto:salomosalomosinaga@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the preparation of the Regional Government Property Needs Plan in supporting orderly asset administration at the Asset Division of BPKAD Palangka Raya City. This research uses a qualitative approach with a descriptive method through interviews, observation, and documentation. The results show that the preparation of RKBMD has been carried out through several stages, starting from the submission of needs by OPDs, data input through the RKBMD application, document checking, verification by the Asset Division, to the proposal for official determination. The process has been supported by an application-based system and physical administrative documents. However, several obstacles are still found, such as incomplete supporting data, mismatches between proposed needs and asset records, delays in data input by OPDs, and the need for better technical understanding in coding and classifying goods. This study emphasizes the importance of strengthening coordination, updating inventory data, and improving technical guidance so that RKBMD preparation can support more effective, orderly, and accountable asset administration.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam mendukung tertib administrasi aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKBMD telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan usulan kebutuhan oleh OPD, penginputan melalui aplikasi RKBMD, pemeriksaan dokumen, verifikasi oleh Bidang Aset, hingga pengusulan penetapan dokumen RKBMD. Proses tersebut

telah didukung oleh sistem berbasis aplikasi dan dokumen administrasi fisik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti data pendukung yang belum lengkap, ketidaksesuaian antara usulan kebutuhan dengan data aset, keterlambatan OPD dalam melakukan penginputan, serta perlunya peningkatan pemahaman teknis dalam pengkodean dan pengelompokan barang. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, pemutakhiran data inventaris, dan pembinaan teknis agar penyusunan RKBMD dapat mendukung administrasi aset yang lebih efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang Milik Daerah bukan hanya dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki daerah, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib, terencana, efektif dan efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Secara regulasi, pengelolaan Barang Milik Daerah sudah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, proses pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, kegiatan penatausahaan, sampai dengan penghapusan barang. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sendiri telah mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah harus terus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu tahapan awal dalam pengelolaan Barang Milik Daerah adalah penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau RKBMD. RKBMD memiliki peran yang penting karena menjadi dasar dalam merencanakan kebutuhan barang, baik untuk pengadaan maupun untuk pemeliharaan. Melalui penyusunan RKBMD, pemerintah daerah dapat mengetahui barang-barang apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh perangkat daerah, menyesuaikan kebutuhan dengan aset yang sudah ada, serta menghindari pengadaan barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam praktiknya, penyusunan RKBMD tidak cukup hanya membuat daftar kebutuhan barang. Proses ini juga memerlukan ketepatan data, kelengkapan dokumen, dan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan pengelola barang. Setiap usulan kebutuhan barang perlu diperiksa dan diverifikasi supaya sesuai dengan kondisi aset yang

ada di lapangan. Kalau data yang digunakan tidak akurat, terlambat disampaikan, atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka proses penyusunan RKBMD dapat mengalami hambatan dan berdampak pada tertib administrasi aset.

Tertib administrasi aset menjadi hal yang penting karena seluruh Barang Milik Daerah harus dicatat, dibukukan, diinventarisasi, dan dilaporkan dengan jelas. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah tidak cukup hanya dilakukan pada tahap penggunaan barang saja, tetapi juga harus didukung dengan administrasi yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah masih sering menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan data, perencanaan, sumber daya manusia, dan penatausahaan aset. Ali dalam penelitiannya tentang sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo menemukan bahwa pengelolaan BMD belum berjalan optimal. Hal ini karena masih terdapat data barang yang belum valid, barang yang belum tercatat, barang yang masih tercatat padahal tidak ada, serta dokumen kepemilikan yang tidak lengkap. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan BMD pada tingkat SKPD masih menghadapi kendala sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah.

Penelitian lain oleh Hasfi yang dikutip dalam Ali menjelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Permasalahan tersebut meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, serta penghapusan barang yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi ini dapat menimbulkan inefisiensi dan pemborosan dalam pengelolaan aset daerah.

Selain itu, penelitian tentang mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa penyusunan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan diawali dengan melihat data kebutuhan yang tersedia. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan adanya ketidaksesuaian antara data dengan kondisi di lapangan. Selain itu juga ada keterlambatan pengguna barang dalam menyampaikan usulan RKBMD kepada pengelola barang. Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan data dan kedisiplinan waktu menjadi faktor penting dalam penyusunan RKBMD.

Penelitian Denu, Elim, dan Kapojos tentang pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan juga menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan

aset tetap, khususnya pada ruang lingkup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, dan penghapusan, perlu disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian tersebut juga menemukan adanya permasalahan pada ketertiban pengelolaan aset, salah satunya karena tidak adanya RKBMD dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

Penelitian terbaru oleh Minabari, Sabijono, dan Kindangen mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah di Kota Manado menjelaskan bahwa penatausahaan BMD mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini karena sama-sama membahas pengelolaan aset daerah dari sisi administrasi.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa penyusunan RKBMD memiliki hubungan yang erat dengan tertib administrasi aset. RKBMD yang disusun dengan baik dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan barang secara lebih tepat, menghindari pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, serta mendukung pencatatan dan pelaporan aset yang lebih tertib. Sebaliknya, apabila penyusunan RKBMD belum didukung data yang lengkap dan koordinasi yang baik, maka proses administrasi aset dapat menjadi kurang optimal.

Dalam konteks BKAD Kota Palangka Raya, Bidang Aset memiliki peran penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama dalam menghimpun, memeriksa, dan menyesuaikan usulan kebutuhan barang dari perangkat daerah. Penyusunan RKBMD pada Bidang Aset memerlukan ketelitian karena berkaitan langsung dengan perencanaan kebutuhan aset daerah. Proses ini tidak hanya menuntut pemahaman terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga kemampuan dalam mengelola data, melakukan verifikasi, serta membangun koordinasi dengan perangkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam mendukung tertib administrasi aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penyusunan RKBMD, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BPKAD Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam aspek perencanaan kebutuhan dan tertib administrasi aset.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam mendukung tertib administrasi aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya. Penelitian ini tidak berfokus pada perhitungan angka, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, peran, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam penyusunan RKBMD.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara sistematis, khususnya pada proses penyusunan RKBMD yang dilaksanakan oleh Bidang Aset. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana usulan kebutuhan barang dari OPD diterima, diperiksa, diverifikasi, dan disusun menjadi dokumen RKBMD. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk memahami sejauh mana penyusunan RKBMD dapat mendukung tertib administrasi aset daerah.

## **Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Data utama diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RKBMD, yaitu:

- Penelitian ini dilaksanakan pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Bidang Aset merupakan bagian yang memiliki peran dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam proses perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengendalian, dan koordinasi pengelolaan aset dengan OPD.
- Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bidang Aset terlibat langsung dalam proses penyusunan RKBMD, mulai dari penerimaan usulan kebutuhan barang dari OPD, pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi usulan, hingga pengusulan dokumen RKBMD untuk ditetapkan.

Fokus penelitian diarahkan pada proses penyusunan RKBMD, termasuk alur pengajuan usulan dari OPD, mekanisme verifikasi, penggunaan aplikasi RKBMD, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mendukung tertib administrasi aset daerah.

### **2. Waktu dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu pada periode Februari hingga Mei 2026. Rentang waktu penelitian mencakup beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta tahap analisis data dan penyusunan artikel penelitian. Penentuan waktu penelitian disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan magang peneliti pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya, sehingga data yang diperoleh dapat

menggambarkan kondisi nyata dalam proses penyusunan RKBMD.

Waktu penelitian mencakup beberapa tahapan, yaitu:

- ✓ tahap persiapan penelitian, meliputi penyusunan instrumen wawancara dan penentuan informan;
- ✓ tahap pengumpulan data, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi;
- ✓ serta tahap analisis data dan penyusunan artikel penelitian.

Penentuan waktu penelitian disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan magang peneliti pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi aktual dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, khususnya pada kegiatan pengajuan usulan dari OPD, pemeriksaan dokumen, verifikasi data, serta pengelolaan administrasi RKBMD.

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, termasuk alur pengusulan, pemeriksaan dokumen, verifikasi data, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mendukung tertib administrasi aset.

Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses penyusunan, pengusulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data RKBMD.

#### **1. Sumber Data Utama**

Data utama diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RKBMD, yaitu:

- a. Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya, sebagai pihak yang memiliki peran koordinatif dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan RKBMD.
- b. Staf atau pegawai yang menangani RKBMD pada Bidang Aset, sebagai pihak yang berperan dalam penerimaan usulan, pemeriksaan dokumen, pengelolaan data, dan verifikasi usulan RKBMD.
- c. Pengurus barang pada OPD, sebagai pihak yang menyusun dan mengajukan usulan kebutuhan barang sebelum disampaikan kepada Bidang Aset.

Informasi yang diperoleh meliputi:

- peran Bidang Aset dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;

- alur penyusunan dan pengajuan RKBMD;
- dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan RKBMD;
- mekanisme pemeriksaan dan verifikasi usulan;
- penggunaan aplikasi RKBMD;
- kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan RKBMD;
- serta upaya yang dilakukan untuk mendukung tertib administrasi aset.

Dari hal tersebut, terdapat 3 (tiga) informan/narasumber yang membantu pengambilan data dalam penelitian ini. Informan tersebut dipilih karena memiliki peran langsung dalam proses penyusunan RKBMD, mulai dari pengajuan kebutuhan barang oleh OPD, penerimaan dan pemeriksaan usulan oleh Bidang Aset, sampai dengan proses verifikasi data RKBMD. Hasil wawancara menunjukkan ketiga posisi tersebut: Kepala Bidang Aset, staf RKBMD, dan pegawai OPD/pegurus barang.

## **2. Sumber Data Tambahan**

- Data tambahan digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data utama serta mendukung proses analisis.
- Sumber data ini diperoleh dari berbagai dokumen dan referensi tertulis, antara lain:
  - ✓ dokumen usulan RKBMD
  - ✓ surat pengantar usulan RKBMD dari OPD
  - ✓ cetak laporan atau data dari aplikasi RKBMD
  - ✓ data Kartu Inventaris Barang
  - ✓ dokumen pendukung dari OPD
  - ✓ peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah
  - ✓ serta literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Data tambahan ini berfungsi untuk memberikan validasi terhadap data utama serta memperkaya analisis mengenai penyusunan RKBMD dalam mendukung tertib administrasi aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh informasi yang lengkap dan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam mendukung tertib administrasi aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RKBMD. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Aset, staf atau pegawai yang menangani RKBMD, serta pengurus barang pada OPD. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena masing-masing memiliki peran yang berkaitan dengan proses pengusulan, pemeriksaan, verifikasi, dan pengelolaan data kebutuhan Barang Milik Daerah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peran Bidang Aset dalam penyusunan RKBMD, alur pengajuan usulan dari OPD, dokumen yang diperlukan, mekanisme verifikasi, kendala yang sering muncul, serta upaya yang dilakukan agar penyusunan RKBMD dapat berjalan lebih tertib. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami proses penyusunan RKBMD secara lebih jelas berdasarkan pengalaman dan penjelasan langsung dari pihak yang terlibat di lapangan. Dalam penelitian ini, terdapat 3 informan atau narasumber.

### 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan RKBMD di lingkungan Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya. Pengamatan difokuskan pada proses administrasi, seperti penerimaan usulan dari OPD, pemeriksaan dokumen, pengelolaan data, serta penggunaan aplikasi RKBMD dalam mendukung proses verifikasi kebutuhan barang. Melalui observasi, peneliti dapat melihat bagaimana proses penyusunan RKBMD berjalan dalam praktiknya. Observasi juga membantu peneliti memahami kondisi nyata di lapangan, termasuk bagaimana koordinasi dilakukan antara Bidang Aset dan OPD serta bagaimana data kebutuhan barang diperiksa sebelum diusulkan untuk ditetapkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen usulan RKBMD, surat pengantar usulan dari OPD, laporan atau hasil cetak dari aplikasi RKBMD, data Kartu Inventaris Barang, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyusunan kebutuhan Barang Milik Daerah. Selain itu, dokumentasi juga mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, serta jurnal atau penelitian terdahulu yang relevan. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih terarah dan memiliki dasar yang jelas.

## **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara bertahap agar data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, studi kepustakaan, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, disederhanakan, serta difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang berkaitan dengan proses administrasi pengajuan hibah, kendala yang dihadapi, serta sistem yang digunakan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan agar data menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, seperti proses penyusunan RKBMD, peran Bidang Aset, kendala dalam pengajuan usulan, serta upaya peningkatan tertib administrasi aset, dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Pada tahap ini, peneliti juga menyisihkan informasi yang kurang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan adanya reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam memahami pokok permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan RKBMD.

### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan alur penyusunan RKBMD, mulai dari pengajuan usulan kebutuhan barang oleh OPD, pemeriksaan dokumen oleh Bidang Aset, verifikasi melalui aplikasi RKBMD, hingga proses penetapan dokumen kebutuhan barang. Melalui penyajian data, peneliti dapat melihat hubungan antara hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen pendukung. Tahap ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola permasalahan, seperti keterlambatan input data, ketidaksesuaian data aset, kelengkapan dokumen, serta koordinasi antara OPD dan Bidang Aset.

### **3. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang

Milik Daerah dan tertib administrasi aset. Studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat hasil temuan di lapangan. Dengan adanya dukungan teori dan regulasi, peneliti dapat membandingkan antara proses penyusunan RKBMD yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai bahan pembanding untuk melihat apakah permasalahan yang ditemukan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kesimpulan yang dibuat tidak hanya didasarkan pada satu sumber data, tetapi dibandingkan dengan berbagai sumber agar hasil penelitian lebih kuat. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan RKBMD dalam mendukung tertib administrasi aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Proses Penyusunan RKBMD**

Proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui tahapan yang cukup terstruktur. Tahapan tersebut dimulai dari penyusunan usulan kebutuhan barang oleh OPD, kemudian usulan disampaikan kepada Bidang Aset untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi. Setelah usulan diperiksa, dokumen RKBMD kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai dokumen perencanaan kebutuhan barang pada masing-masing perangkat daerah. Dalam proses ini, OPD berperan sebagai pihak yang mengajukan kebutuhan barang, sedangkan Bidang Aset berperan dalam menerima, menelaah, memverifikasi, dan mengoordinasikan usulan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan di lapangan, penyusunan usulan kebutuhan barang di OPD dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil pelaksanaan tugas, kondisi barang yang sudah ada, data inventaris, serta prioritas program kerja perangkat daerah. Sebelum disampaikan kepada Bidang Aset, OPD biasanya melakukan inventarisasi kebutuhan pada masing-masing bidang atau subbagian, kemudian membahasnya secara internal bersama pihak terkait. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi usulan RKBMD yang disesuaikan dengan program dan kegiatan OPD.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan RKBMD juga telah didukung oleh penggunaan aplikasi. OPD melakukan penginputan usulan melalui aplikasi RKBMD

sesuai dengan kelompok usulan, seperti pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan. Selain melalui aplikasi, OPD tetap menyiapkan dokumen fisik seperti surat pengantar, lampiran usulan, dan cetak laporan dari aplikasi sebagai kelengkapan administrasi. Setelah usulan masuk, Bidang Aset melalui analisis kebutuhan melakukan telaah dan verifikasi terhadap usulan tersebut, terutama terkait kelengkapan dokumen, kesesuaian kode barang, standar kebutuhan, standar barang, standar harga, serta kesesuaian data dengan Kartu Inventaris Barang.

Jika dianalisis lebih lanjut, tahapan penyusunan RKBMD pada dasarnya bertujuan untuk memastikan agar kebutuhan barang yang diajukan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perangkat daerah. Proses verifikasi yang dilakukan Bidang Aset menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko usulan barang yang tidak sesuai kebutuhan, ketidaksesuaian data aset, maupun pengadaan barang yang kurang tepat sasaran. Dengan demikian, penyusunan RKBMD tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian aset daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wafda dan Nurhazana yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah dilakukan melalui penyusunan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan dengan memperhatikan kebutuhan barang serta ketentuan yang berlaku. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian usulan dan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan dapat menjadi kendala dalam penyusunan RKBMD (Wafda & Nurhazana, 2020).

Selain itu, Denu, Elim, dan Kapojos menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Rencana kebutuhan barang dari setiap perangkat daerah perlu diteliti dan dihimpun agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan RKBMD. Temuan tersebut memperkuat bahwa proses penyusunan RKBMD membutuhkan pemeriksaan, penyesuaian data, dan koordinasi antarunit kerja agar perencanaan aset dapat berjalan lebih tertib (Denu, Elim, & Kapojos, 2022).

Dengan demikian, proses penyusunan RKBMD pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya sudah menunjukkan adanya alur administrasi yang jelas, mulai dari penyusunan usulan oleh OPD, penginputan melalui aplikasi, pemeriksaan dokumen, verifikasi oleh Bidang Aset, hingga pengusulan penetapan RKBMD. Namun, proses tersebut tetap memerlukan ketelitian data, kelengkapan dokumen, serta koordinasi yang baik antara OPD dan Bidang Aset agar RKBMD yang disusun dapat benar-benar mendukung tertib administrasi aset daerah.

### **Evaluasi Sistem Administrasi penyusunan RKBMD**

Sistem administrasi penyusunan RKBMD pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan alur yang cukup jelas. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RKBMD tidak hanya dilakukan melalui dokumen fisik, tetapi juga telah didukung dengan penggunaan aplikasi. OPD menyampaikan usulan kebutuhan barang melalui aplikasi RKBMD yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain itu, OPD tetap menyiapkan dokumen fisik seperti surat pengantar, lampiran usulan kebutuhan barang, dan hasil cetak laporan dari aplikasi sebagai kelengkapan administrasi.

Penggunaan aplikasi dalam penyusunan RKBMD pada dasarnya membantu proses administrasi menjadi lebih tertata. Melalui aplikasi tersebut, OPD dapat menginput usulan sesuai dengan kelompok kebutuhan, seperti pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan. Setelah usulan masuk, Bidang Aset melalui analis kebutuhan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data yang diajukan. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian kode barang, standar kebutuhan, standar barang, standar harga, serta kesesuaian data dengan Kartu Inventaris Barang.

Namun, dalam praktiknya, sistem administrasi RKBMD masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang sering muncul adalah data yang diajukan OPD belum sepenuhnya lengkap atau belum sesuai dengan kondisi barang yang tercatat. Misalnya, dalam usulan pemeliharaan masih dapat ditemukan perbedaan antara barang yang tercatat pada KIB dengan barang yang diusulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan RKBMD tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga membutuhkan ketelitian data dan pembaruan data inventaris secara berkala.

Selain kendala data, keterlambatan OPD dalam melakukan penginputan usulan RKBMD juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Keterlambatan tersebut dapat memengaruhi tahapan berikutnya, terutama proses pemeriksaan, verifikasi, dan penetapan dokumen RKBMD. Apabila usulan dari OPD tidak disampaikan sesuai jadwal, maka Bidang Aset juga membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan telaah dan menindaklanjuti usulan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem administrasi RKBMD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kedisiplinan dan koordinasi antara OPD dengan Bidang Aset.

Jika dianalisis lebih lanjut, sistem administrasi penyusunan RKBMD sudah mendukung tertib administrasi aset karena setiap usulan kebutuhan barang harus melalui proses penginputan, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi data sebelum ditetapkan. Akan tetapi, sistem tersebut masih perlu diperkuat dari sisi kualitas data, kelengkapan dokumen, dan ketepatan waktu penyampaian usulan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Wafda dan Nurhazana yang menyatakan bahwa penyusunan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan harus memperhatikan kebutuhan riil Barang Milik Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya masih dapat mengalami kendala berupa keterlambatan

usulan dan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan (Wafda & Nurhazana, 2020).

Selain itu, Denu, Elim, dan Kapojos menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam penelitian tersebut, pengelolaan BMD pada ruang lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran dinilai belum sesuai apabila tidak didukung oleh RKBMD sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Temuan tersebut memperkuat bahwa penyusunan RKBMD harus dilakukan secara tertib karena berpengaruh terhadap ketepatan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan aset daerah (Denu, Elim, & Kapojos, 2022).

Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem administrasi penyusunan RKBMD pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa sistem yang digunakan sudah cukup membantu dalam mendukung proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah. Namun, masih diperlukan peningkatan koordinasi, pembinaan teknis kepada OPD, pemutakhiran data inventaris, serta kedisiplinan dalam penginputan usulan. Upaya tersebut penting agar penyusunan RKBMD tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga benar-benar menjadi dasar perencanaan aset yang tertib, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Kendala dalam Proses Penyusunan RKBMD**

Dalam proses penyusunan RKBMD pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya, terdapat beberapa kendala yang masih perlu diperhatikan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kurang lengkapnya data yang disampaikan oleh OPD. Data yang belum lengkap dapat memperlambat proses pemeriksaan karena Bidang Aset perlu melakukan konfirmasi kembali kepada OPD pengusul. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelengkapan data menjadi bagian penting dalam penyusunan RKBMD, karena data tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah usulan kebutuhan barang sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perangkat daerah.

Selain kelengkapan data, kendala lain yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian antara usulan kebutuhan barang dengan data aset yang tercatat. Dalam beberapa kasus, usulan pemeliharaan yang diajukan OPD belum sepenuhnya sinkron dengan data pada Kartu Inventaris Barang. Misalnya, barang yang sudah berada dalam kondisi rusak berat masih dapat masuk dalam usulan pemeliharaan. Padahal, barang dengan kondisi rusak berat tidak lagi layak diprioritaskan untuk diperbaiki karena biaya pemeliharaan dapat lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan RKBMD memerlukan ketelitian dalam mencocokkan data usulan dengan kondisi aset yang sebenarnya.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterlambatan OPD dalam melakukan penginputan usulan RKBMD. Keterlambatan ini dapat memengaruhi tahapan

selanjutnya, seperti proses verifikasi, telaah usulan, dan penetapan dokumen RKBMD. Apabila usulan tidak disampaikan sesuai jadwal, maka Bidang Aset juga membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti kekurangan data. Dengan demikian, ketepatan waktu dari OPD menjadi salah satu faktor penting agar penyusunan RKBMD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, kendala teknis juga masih ditemukan, terutama pada pengkodean barang, pengisian satuan barang, dan rincian volume kebutuhan. Beberapa usulan barang baru masih belum memiliki pengkodean yang spesifik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. Selain itu, pengisian satuan barang yang masih bersifat umum atau belum diuraikan secara rinci juga dapat menyulitkan proses verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman teknis OPD dalam menyusun usulan RKBMD masih perlu terus ditingkatkan agar data yang diajukan lebih jelas dan mudah diperiksa.

Jika dianalisis lebih lanjut, kendala dalam penyusunan RKBMD tidak hanya disebabkan oleh sistem atau aplikasi yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas data, kedisiplinan waktu, dan koordinasi antarunit kerja. Aplikasi RKBMD memang sudah membantu proses penginputan dan pengelolaan data, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan OPD dalam mengisi data dan melengkapi dokumen pendukung. Oleh karena itu, koordinasi antara Bidang Aset dan OPD menjadi hal penting agar setiap kesalahan atau kekurangan dalam usulan dapat segera diperbaiki.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wafda dan Nurhazana yang menyatakan bahwa penyusunan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan dapat mengalami kendala berupa keterlambatan penyampaian usulan serta ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu dan kesesuaian data merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran penyusunan RKBMD (Wafda & Nurhazana, 2020). Sumber penelitian tersebut dapat diakses melalui prosiding Seminar Nasional Industri dan Teknologi Politeknik Negeri Bengkalis.

Selain itu, Ali, Karamoy, dan Warongan dalam penelitiannya mengenai sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo menemukan bahwa pengelolaan BMD belum berjalan optimal karena masih terdapat data barang yang belum valid, barang yang belum tercatat, barang yang masih tercatat tetapi tidak ditemukan, serta dokumen kepemilikan yang belum lengkap. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena kendala dalam penyusunan RKBMD juga berkaitan dengan keakuratan data dan kelengkapan dokumen aset (Ali, Karamoy, & Warongan, 2017).

Penelitian Denu, Elim, dan Kapojos juga menjelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pada ruang lingkup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, dan penghapusan, masih perlu disesuaikan dengan ketentuan Permendagri

Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini memperkuat bahwa proses penyusunan RKBMD harus dilakukan secara tertib, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyesuaian data, sampai dengan penetapan dokumen, agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan sesuai aturan (Denu, Elim, & Kapojos, 2022).

Dengan demikian, kendala dalam proses penyusunan RKBMD pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kelengkapan data, kesesuaian data aset, ketepatan waktu penginputan, pemahaman teknis OPD, serta koordinasi antara OPD dan Bidang Aset. Kendala-kendala tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kelancaran penyusunan RKBMD dan tertib administrasi aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan teknis, pemutakhiran data inventaris, serta peningkatan kedisiplinan OPD dalam menyampaikan usulan agar proses penyusunan RKBMD dapat berjalan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Analisis Penguatan Sistem Berbasis Aplikasi dalam Penyusunan RKBMD**

Berdasarkan hasil evaluasi, proses penyusunan RKBMD pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya telah didukung oleh penggunaan sistem berbasis aplikasi. Aplikasi RKBMD digunakan oleh OPD untuk menginput usulan kebutuhan Barang Milik Daerah, baik dalam kelompok pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, maupun pemanfaatan. Penggunaan aplikasi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan RKBMD sudah mulai diarahkan pada sistem administrasi yang lebih tertata dan terdokumentasi. Namun, dalam pelaksanaannya, OPD tetap diwajibkan menyiapkan dokumen fisik seperti surat pengantar, lampiran usulan, dan hasil cetak laporan dari aplikasi sebagai kelengkapan administrasi.

Sistem berbasis aplikasi memiliki peran penting dalam membantu proses administrasi penyusunan RKBMD. Melalui aplikasi tersebut, usulan kebutuhan barang dari OPD dapat dihimpun secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan Bidang Aset dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Selain itu, aplikasi juga membantu dalam pengelompokan usulan kebutuhan barang berdasarkan jenis pengelolaan aset. Dengan adanya sistem ini, proses penyusunan RKBMD tidak hanya bergantung pada dokumen manual, tetapi juga didukung oleh data yang telah diinput secara digital.

Selain membantu proses penginputan, aplikasi RKBMD juga mendukung kegiatan verifikasi usulan. Bidang Aset melalui analisis kebutuhan dapat melakukan telaah terhadap usulan yang diajukan OPD, terutama berkaitan dengan kesesuaian kode barang, standar kebutuhan, standar barang, standar harga, serta data aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang. Proses ini penting karena RKBMD tidak hanya berisi daftar barang yang diusulkan, tetapi juga harus menggambarkan kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan kondisi aset dan kebutuhan kerja OPD.

Namun demikian, penggunaan aplikasi dalam penyusunan RKBMD belum sepenuhnya menghilangkan kendala administrasi. Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat OPD yang terlambat melakukan penginputan usulan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, masih ditemukan data usulan yang belum lengkap atau belum sesuai dengan data aset yang tercatat. Misalnya, dalam usulan pemeliharaan masih dapat terjadi ketidaksesuaian antara jumlah barang yang diusulkan dengan kondisi barang pada Kartu Inventaris Barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi belum cukup apabila tidak didukung oleh ketelitian pengguna dan pemutakhiran data inventaris secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, sistem berbasis aplikasi juga masih berjalan berdampingan dengan dokumen fisik. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban OPD untuk tetap mencetak laporan dari aplikasi dan menyampaikan surat pengantar usulan RKBMD kepada Bidang Aset. Di satu sisi, dokumen fisik diperlukan sebagai bukti administrasi dan dasar pemeriksaan. Namun di sisi lain, apabila data pada dokumen fisik tidak sesuai dengan data pada aplikasi, maka proses verifikasi tetap membutuhkan waktu tambahan. Oleh karena itu, kesesuaian antara data digital dan dokumen fisik menjadi hal penting dalam mendukung kelancaran penyusunan RKBMD.

Jika dianalisis lebih lanjut, permasalahan utama dalam penggunaan aplikasi RKBMD bukan hanya terletak pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kesiapan OPD dalam menggunakan sistem tersebut secara tertib. Aplikasi dapat membantu mempercepat proses administrasi apabila data yang diinput sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi riil. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan masih kurang tepat, maka proses verifikasi oleh Bidang Aset tetap akan mengalami hambatan. Dengan demikian, efektivitas aplikasi RKBMD sangat dipengaruhi oleh kualitas data, kedisiplinan OPD, serta koordinasi antara OPD dan Bidang Aset.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wafda dan Nurhazana yang menyatakan bahwa penyusunan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan perlu memperhatikan kebutuhan riil Barang Milik Daerah serta ketepatan data yang digunakan. Dalam penelitian tersebut, kendala yang ditemukan berkaitan dengan keterlambatan penyampaian usulan dan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi RKBMD perlu didukung oleh data yang akurat dan kedisiplinan waktu agar proses perencanaan kebutuhan barang dapat berjalan lebih optimal (Wafda & Nurhazana, 2020).

Selain itu, Minabari, Sabijono, dan Kindangen menjelaskan bahwa penatausahaan Barang Milik Daerah mencakup kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang harus dilakukan secara tertib. Dalam konteks penyusunan RKBMD, ketertiban data aset menjadi hal yang penting karena usulan kebutuhan barang harus disusun berdasarkan data inventaris yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data inventaris belum

diperbarui secara berkala, maka proses penyusunan RKBMD juga dapat mengalami kendala dalam tahap pemeriksaan dan penyesuaian kebutuhan barang (Minabari, Sabijono, & Kindangen, 2025).

Dengan demikian, penguatan sistem berbasis aplikasi dalam penyusunan RKBMD perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas data, pemutakhiran Kartu Inventaris Barang, pembinaan teknis kepada OPD, serta kedisiplinan dalam penginputan usulan. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka aplikasi RKBMD dapat menjadi sarana yang lebih efektif dalam mendukung perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dan tertib administrasi aset pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya telah berjalan melalui tahapan yang cukup terstruktur. Proses tersebut dimulai dari pengajuan usulan kebutuhan barang oleh OPD, penginputan melalui aplikasi RKBMD, pemeriksaan dokumen, verifikasi oleh Bidang Aset, hingga pengusulan penetapan dokumen RKBMD. Penyusunan RKBMD memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi aset karena menjadi dasar dalam merencanakan kebutuhan barang, baik untuk pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, maupun pemanfaatan aset daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti data pendukung yang belum lengkap, ketidaksesuaian antara usulan kebutuhan dengan data aset pada Kartu Inventaris Barang, keterlambatan OPD dalam melakukan penginputan, serta masih perlunya peningkatan pemahaman teknis terkait pengisian data dan pengkodean barang. Meskipun aplikasi RKBMD telah digunakan, efektivitasnya masih bergantung pada ketepatan data, kelengkapan dokumen, kedisiplinan OPD, serta koordinasi antara OPD dan Bidang Aset. Penelitian ini terbatas pada Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya dan belum mengkaji secara mendalam efektivitas aplikasi RKBMD maupun perbandingan penyusunan RKBMD pada setiap OPD.

Oleh karena itu, disarankan agar Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya terus meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis kepada OPD dalam penyusunan RKBMD. Selain itu, OPD perlu lebih disiplin dalam menyampaikan usulan sesuai jadwal, memperbarui data inventaris secara berkala, serta memastikan kelengkapan dokumen sebelum usulan diajukan. Penggunaan aplikasi RKBMD juga perlu terus dioptimalkan agar proses penyusunan kebutuhan Barang Milik Daerah dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* "Goodwill", 8(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17174>
- Denu, Y., Elim, I., & Kapojos, P. M. (2022). Evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 919–928.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekososbudkum/article/view/44814>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Diakses 26 Mei 2026.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah*. Diakses 26 Mei 2026.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/196220/permendagri-no-47-tahun-2021>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Diakses 26 Mei 2026.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Minabari, F., Sabijono, H., & Kindangen, W. D. (2025). Analisis penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 13(1), 155–164. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/59522>
- Pemerintah Kota Palangka Raya. (2024). *Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya*. Diakses 26 Mei 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311169/perwali-kota-palangkaraya-no-31-tahun-2024>
- Wafda, I. P., & Nurhazana. (2020). Mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis*.

<https://intechbiz.polbeng.ac.id/eprosiding/index.php/snit/article/download/142/129/>